

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEDAGANG SAYUR (Studi pada Pedagang Sayur Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)

Viana Dhama Yantie, Irwan Noor, Lely Indah Mindarti

Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang

Email: -

Abstract: *Implementation credit assistance program to increase greengrocer's work productivity this research were to study and described the wisdom of credit implementation by the local government, analyzed greengrocer's work productivity in Duwet Krajan village, Tumpang Sub-district, Malang District and also analyzed supporting and resistor factors that effect. This research used qualitative method because this research described in detail, sequence and based on field facts. The analyze qualitative data used Miles and Huberman's model. The result of the research indicated that the role of cooperative department and mikro, small & medium business in Kepanjen Sub-District, Malang District very important for greengrocers in helping to develop small and medium business. The government supports to facilitate the regulation or rules for greengrocers to get fund access. With the evaluation of implementation credit assistance program, greengrocers would understand how to finance management simply, marketing system and product packaging. In this case credit assistance very well, and impact the increasing of business fund, and increasing of work productivity as well. The conclusion of this research was implantation of credit assistance program by cooperative department and mikro, small and medium business in Kepanjen Sub-District, Malang District was well and could increasing greengrocer's work productivity.*

Keyword: *Implementation of Credit Assist Program, Work Productivity, Trader*

Abstrak: Implementasi program bantuan pemberian kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan bantuan kredit yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, menganalisis produktivitas kerja pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sangat penting bagi para pelaku UMKM dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pemerintah sangat mendukung dengan memudahkan regulasi atau aturan bagi pelaku UMKM dalam memproses akses permodalan. Dengan adanya evaluasi setelah dilakukannya program pemberian kredit, maka pelaku UMKM akan lebih mengetahui bagaimana membuat manajemen keuangan sederhana, cara memasarkan dan pengemasan produk. Bantuan kredit usaha secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik, dan berdampak dengan peningkatan modal usaha, dan peningkatan produktivitas kerja yang juga sudah mendapatkan hasil yang baik. Dengan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap program bantuan pemberian kredit. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi program bantuan pemberian kredit oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: *Implementasi Program Bantuan Pemberian Kredit, Produktivitas Kerja, Pedagang*

Pendahuluan

Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas. (Effendi, dalam artikel yang berjudul membangun *Good Government*).

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mencapai tujuan Negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual maka perlu terus dikembangkannya sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan akan dapat

diwujudkan melalui kebijakan perdagangan yang mendorong dan membantu pengusaha kecil dalam sektor perdagangan. Dalam memajukan kegiatan perekonomian perlu melibatkan banyak pihak antara lain BUMN, swasta, koperasi, maupun pelaku ekonomi berskala kecil.

Krisis ekonomi yang terjadi seperti saat ini tidak hanya menimbulkan dampak makro, tetapi juga menimbulkan dampak mikro seperti para pengusaha kecil yang bergerak dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi dengan adanya krisis global yang terjadi saat ini akan semakin mematikan para pengusaha atau pedagang kecil, karena akan lebih sulit lagi mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Padahal sekarang ini perkembangan usaha kecil mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian secara nasional bahkan dunia.

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan modal yang sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan usahanya. Di pedesaan, banyak para pemberi modal seperti rentenir¹, dan pengijon² yang memberikan modal dengan menggunakan harta benda sebagai jaminan. Tetapi bantuan modal dari para rentenir tersebut hanya menyelesaikan masalah para pedagang kecil untuk sementara waktu, setelah itu pedagang kecil akan mendapat masalah baru yaitu pengembalian utang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan konsekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat, hal itu akan membuat pedagang kecil semakin sulit mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pedagang kecil justru mempunyai dua masalah yang sangat rumit yaitu kesulitan modal serta kesulitan mengembalikan utang

¹ Rentenir : orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang ; tukang riba ; pelepas uang ; lintah darat

² Pengijon : orang yang membeli padi sebelum masak, dan diambil oleh pembeli sesudah masak

dengan suku bunga yang sangat tinggi. Oleh karena, itu pemerintah harus segera tanggap dalam mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi oleh pedagang kecil tersebut, karena jika dibiarkan berlarut-larut maka para pedagang kecil akan semakin sulit mendapatkan modal dan akan semakin sulit mengembangkan usahanya.

Berdasarkan SK Bupati Nomor 180/273/KEP/421.013/2009, tentang penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Usaha pemerintah dalam mengembangkan usaha pedagang kecil melalui Dinas Koperasi yaitu dengan memberikan bantuan dan bimbingan teknis, pelatihan keterampilan serta pemasaran, sedangkan bantuan ekonomi yang diberikan Dinas Koperasi berupa pemberian bantuan kredit. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UMKM, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir yang terletak di Kecamatan Kepanjen memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir sebagai salah satu badan perkreditan yang dimiliki oleh pemerintah yang berada di tingkat kabupaten yang akan memberikan kemudahan para pedagang kecil untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah serta suku bunga yang rendah yang dihadirkan di tengah kehidupan para pelaku ekonomi berskala kecil guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta yang paling diharapkan adalah meningkatkan produktivitas pedagang kecil agar kesejahteraan pedagang kecil lebih terjamin. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir membantu pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan. Kredit yang diberikan diharapkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan pedagang kecil dalam menggunakan kreditnya secara selektif guna mencapai tujuan yang diinginkan serta tidak membebani pedagang kecil. Adanya tambahan modal yang diberikan, usaha pedagang kecil akan semakin meningkat

dan berkembang dengan ketersediaan barang yang bertambah, dan diharapkan produktivitas pedagang kecil akan semakin meningkat.

Kecamatan Tumpang adalah salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan kredit dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir. Bantuan kredit diberikan kepada Sektor UKM, UD, dan juga kepada pedagang sayur. Pedagang sayur yang mendapat bantuan kredit ini hanya ada tiga pedagang, dan ketiganya berada di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Pada Desa Duwet Krajan ini, sayur merupakan sektor utama perdagangan. Namun di desa ini hanya tiga pedagang yang memanfaatkan fasilitas bantuan kredit dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir.

Kajian Pustaka

Pengertian kebijakan publik menurut R.S. Parker sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (2008, h.51) mengartikan kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008 : 184) mengatakan bahwa “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.”

Menurut Hogwood dan Gunn dikutip Abdul Wahab (2008, h. 34-38), mengatakan bahwa hakikatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sesudah kebijakan tertentu diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu senyatanya mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan UMKM

bahwa pengertian atau definisi Usaha mikro, yakni usaha mikro produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau lembaga yang mempunyai karakteristik sebagaimana dibahas dalam undang-undang ini. Usaha kecil, yakni usaha produktif yang mandiri, dilakukan oleh perorangan atau lembaga dan bukan merupakan bagian dari anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dengan hasil jualan tahunan atau jumlah kekayaan bersih sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas.

Prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki tempat usaha yang tidak mobile (tidak menetap), dan suatu waktu bisa berpindah-pindah, Komoditas usahanya tidak bersifat tetap apalagi permanen, dan seringkali berubah suatu waktu. Kriteria Usaha Kecil adalah Komoditasnya pada umumnya sudah tetap, atau sulit untuk berubah, lokasi usahanya juga secara umum sudah menetap alias tak pernah berpindah-pindah, pencatatan atau administrasi keuangan sudah dilakukan walau secara sederhana. Kriteria Usaha Menengah adalah Manajemen yang sudah ada sudah tergolong baik, teratur, dan bahkan modern, administrasi keuangannya pun telah tertata dengan profesional, memiliki legalitas usaha yang sah dan kuat kedudukannya secara hukum, sudah masuk akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.

Kelebihan dan kekurangan UMKM adalah Inovasi dalam teknologi yang telah

dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil, kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan dengan skala besar yang pada umumnya birokratis. Kekurangan UMKM adalah tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang, kekurangan informasi bisnis, pembagian kerja tidak proposional, kesulitan modal kerja.

Manfaat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah Usaha mikro dianggap dapat meredakan gejolak sosial, karena jenis usaha ini mudah dimasuki oleh masyarakat kecil. Terutama sejak krisis dan banyak pabrik yang menutup usahanya atau mengurangi karyawannya, usaha mikro menjadi alternatif pilihan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Kredit dalam bahasa latin disebut dengan "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka memperoleh kekayaan, sedangkan si pemberi kredit berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang akan dipinjam akan kembali (Kasmir, 2001, h.73). Penerima, bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya dan mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Indikator dari produktivitas kerja menurut Agus Dharma (2003:355) antara lain Kualitas pekerjaan yaitu, mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran "tingkat kepuasan" yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. Pada penelitian ini item yang digunakan sebagai indikator pertanyaan meliputi mutu hasil kerja sesuai dengan keinginan atau harapan, dan mutu hasil kerja lebih meningkat dari waktu yang lalu, Kuantitas pekerjaan yaitu, jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini

berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Pada penelitian ini item yang digunakan sebagai indikator pertanyaan meliputi jumlah hasil kerja sesuai dengan yang ditargetkan, dan hasil kerja mengalami kemajuan dari waktu yang lalu, Ketepatan waktu yaitu sesuai atau tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Pengertian pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan sumber dari www.dikmenum.go.id yang diunduh dari balai.pustaka.wordpress.com/2009 Pedagang dibedakan menjadi pedagang besar (Grosir atau *Wholesaler*) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang yang lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam partai besar sedangkan pedagang eceran (*Retailer*) adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Untuk membeli biasa partai besar, tetapi menjualnya biasanya dalam partai kecil atau per-satuan.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data model Miles and Huberman. Dengan fokus penelitian implementasi program bantuan pemberian kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas pedagang sayur meliputi: peran dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terkait program pemberian kredit, bentuk dukungan dari pemerintah di dalam pelaksanaan program pemberian kredit, evaluasi setelah dilakukan program pemberian kredit. kaitan program bantuan kredit dalam meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur yang meliputi: bantuan kredit usaha, peningkatan modal

usaha, peningkatan produktivitas kerja, faktor yang berpengaruh terhadap program pemberian bantuan kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat.

Pembahasan

Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah sangat penting bagi para pelaku UMKM. Dimana sangat membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Dengan adanya peran Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini, tidak hanya sebatas memberikan pinjaman modal, tetapi juga membina dari dasar, memfasilitasi serta memonitoring segala perkembangan UMKM yang dibina. Penelitian ini sesuai dengan pengertian kebijakan publik yaitu menurut R.S. Parker sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (2008 : 51) mengartikan kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga melakukan kegiatan terkait dengan program pemberian kredit, yaitu dengan turun ke lapangan untuk memonitoring pelaku UMKM minimal 3 bulan sekali, dengan tujuan agar program pemberian kredit ini terlaksana dengan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah dibuat. Serta dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang ada kepada pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang disini tidak lepas tangan begitu saja terhadap pelaku UMKM yang dibinanya setelah mendapatkan bantuan kredit, tetapi tetap memonitoring dan

mengevaluasi kerja mereka dengan memberikan binaan sumber daya manusia, agar tingkat produktivitasnya tidak menurun.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008 : 184) mengatakan bahwa “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan publik, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.”

Dalam pelaksanaan program pemberian kredit, bentuk dukungan dari pemerintah yang ada adalah sangat membantu Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam ikut melancarkan pelaksanaan program pemberian kredit yang ada. Bahwa Pemerintah sangat mendukung adanya pelaksanaan program pemberian kredit yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini, dengan memudahkan regulasi atau aturan bagi pelaku UKM dalam memperoleh akses permodalan, serta memberi tambahan modal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Penelitian ini sesuai dengan pendapat (Effendi, dalam artikel yang berjudul membangun *good governance*) bahwa Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adat, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan

(*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *Good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Evaluasi setelah pelaksanaan program pemberian kredit adalah sangat penting, guna mengetahui hasil dari pelaksanaan program pemberian kredit yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Dengan adanya evaluasi setelah dilakukannya program pemberian kredit, maka pelaku UMKM akan lebih mengetahui bagaimana membuat manajemen keuangan sederhana, bagaimana cara memasarkan, dan cara pengemasan produk.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Hogwood dan Gunn dikutip Abdul Wahab (2008 : 34-38) hakikatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sesudah kebijakan tertentu diimplementasikan. Dengan begitu evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu senyatanya mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang kemudian dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi apakah tersebut layak ataukah tidak layak sehingga perlu adanya perubahan.

Bantuan kredit usaha dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian kredit usaha dengan bunga pengembalian yang ringan sebesar 6 % per tahun dengan jangka waktu peminjaman 2 tahun, dan dengan adanya pemberian kredit usaha ini, pedagang mampu menambah pembelian bahan baku, dan pembayaran gaji karyawan atau pekerja. Dan dengan adanya pemberian kredit usaha ini, sangat membantu ketiga pedagang sayur yang mendapatkan bantuan kredit tersebut. Sehingga pemberian kredit usaha ini saling berhubungan terhadap modal usaha untuk meningkatkan produktivitas pedagang sayur

yang mendapatkan bantuan kredit di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2001 : 73) bahwa apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka memperoleh kekayaan, sedangkan si pemberi kredit berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang akan dipinjam akan kembali dan bagi penerima, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya dan mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Peningkatan modal usaha ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang secara keseluruhan sudah mendapatkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya peralatan transportasi yang digunakan untuk proses distribusi penjualan sayur, bertambahnya sarana produksi fisik (alat-alat dan lapak / tempat berjualan), serta kemudahan distribusi (sistemnya).

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Mubyarto (1937) bahwa modal adalah barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru. Dengan demikian, modal dapat berwujud barang dan uang. Sejumlah uang menjadi modal apabila ditanam atau diinvestasikan untuk menjamin adanya suatu kembalian. Dalam arti ini modal juga mengacu kepada investasi itu sendiri yang berupa alat-alat finansial seperti deposito, stok barang, ataupun surat saham yang mencerminkan hak atas sarana produksi, atau dapat pula berupa sarana produksi fisik. Kembalian dapat berupa pembayaran bunga, ataupun klaim atas suatu keuntungan. Modal yang berupa barang, mencakup modal tetap dalam bentuk bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi.

Produktivitas kerja ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sudah mendapatkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan mutu hasil kerja yang sesuai dengan keinginan atau harapan, mutu hasil kerja lebih meningkat dari waktu ke

waktu, jumlah hasil kerja sesuai dengan yang ditargetkan, hasil kerja mengalami kemajuan dari waktu yang lalu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun mereka juga memiliki persepsi bahwa jumlah hasil tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Karena seringkali permintaan pasar banyak tapi barang sedikit, dan sebaliknya barang banyak tapi permintaan pasar sedikit.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Agus Dharma (2003 : 355) antara lain Kualitas pekerjaan yaitu, mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran, Kuantitas pekerjaan yaitu, jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan, Ketepatan waktu, yaitu sesuai atau tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

a. Faktor Pendukung

Adanya struktur organisasi yang terintegrasi, Tersedianya data yang akurat.

b. Faktor Penghambat

Hambatan pelaksanaan program ini adalah kurangnya peran serta dan konsistensi dari pemilik usaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak dinas dalam upaya peningkatan produktivitas serta pengembangan usaha kecil. Beberapa hambatan lain yang diidentifikasi oleh pihak Dinas adalah:

Pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh pedagang sayur masih tergolong rendah. Sehingga kurang mampu melakukan inovasi serta kurang menyadari pentingnya pengembangan usaha.

Rendahnya modal usaha dikarenakan kebanyakan dari pedagang sayur tersebut adalah usaha dimana modal masih berasal dari uang sendiri.

Kurangnya permodalan atau kucuran dana dari pemerintah daerah untuk

membantu meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur tersebut.

Jadi kesimpulannya, memiliki dua faktor penghambat, yaitu faktor eksternal dan internal. Dimana faktor internal berasal dari pengetahuan dan pendidikan dari pedagang sayur sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari ketersediaan modal usaha yang ada.

Penutup

Berdasarkan hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

implementasi program pemerintah dalam memberikan bantuan kredit bagi pedagang sayur telah berjalan dengan baik, yang meliputi:

Peran Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sangat membantu dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Dan juga membina dari dasar, memfasilitasi serta memonitoring segala perkembangan UMKM yang dibina.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terkait program bantuan pemberian kredit adalah pihak Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tidak lepas tangan begitu saja terhadap pelaku UMKM yang dibinanya setelah mendapatkan bantuan kredit, tetapi tetap memonitoring dan mengevaluasi kerja mereka dengan memberikan binaan sumber daya manusia, agar tingkat produktivitasnya tidak menurun.

Bentuk dukungan dari pemerintah di dalam pelaksanaan program bantuan pemberian kredit adalah dengan memudahkan regulasi atau aturan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan, serta memberi tambahan modal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Evaluasi setelah dilakukan program bantuan pemberian kredit yaitu memberikan layanan konsultasi manajemen keuangan sederhana, membantu perluasan pemasaran, membantu bimbingan teknis tentang pengemasan produk.

Kaitan program bantuan pemberian kredit dalam meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur yang meliputi:

Bahwa bantuan kredit usaha yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, adalah sangat memberikan banyak manfaat dan sangat membantu ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan yang telah mengikuti program tersebut, dan telah mendapatkan fasilitas bantuan pinjaman kredit, untuk membantu kesulitan permodalan usaha mereka, yang secara otomatis akan membantu meningkatkan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur tersebut. Dan ternyata, program bantuan seperti inilah yang mereka tunggu sejak dulu.

Peningkatan modal usaha ketiga pedagang sayur pun juga mengalami peningkatan, dari yang semula kesulitan mendapatkan bahan baku, karena keterbatasan modal, sekarang dengan adanya bantuan kredit yang telah diterima, memudahkan mereka untuk membeli bahan baku, penambahan sarana, alat-alat produksi usaha mereka. Dan menjadikan modal mereka terus berputar selain untuk kebutuhan usaha, juga untuk kebutuhan pribadi mereka, modal yang dihasilkan juga dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, untuk kebutuhan menyekolahkan anak, dan ada juga yang modal barang yang dihasilkan berupa tanah.

Peningkatan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang secara otomatis juga meningkat, karena ketersediaan modal yang ada, yang berawal dari pemberian bantuan kredit, menjadikan ketiga pedagang sayur menjadi lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga secara tidak langsung berdampak juga pada

proses kerja produksi usaha mereka, mulai dari mutu hasil kerja yang sesuai dengan keinginan atau harapan ketiga pedagang sayur tersebut, mutu hasil kerja yang lebih meningkat dari waktu ke waktu, jumlah hasil kerja yang mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun juga ada sedikit kendala, terkait dengan jumlah hasil kerja sesuai dengan yang ditargetkan ternyata kendala dari ketiga pedagang sayur ini memiliki kesamaan yang sama, yaitu mereka tidak dapat mentargetkan apakah barang yang mereka kirim saat itu juga akan terjual atau tidak di pasaran. Misalnya apabila permintaan pasar tinggi, terkadang barang yang harus dikirim tidak ada, atau barang yang akan dikirim tersedia banyak, namun permintaan pasar sedikit, itupun juga sering terjadi. Jadi mereka dikatakan rugi pada saat itu.

Faktor yang berpengaruh terhadap program bantuan pemberian kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur meliputi :

faktor pendukung

Adanya struktur organisasi yang terintegrasi, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki struktur organisasi yang terintegrasi, ini terbukti bahwa dalam implementasi program bantuan pemberian kredit dalam meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang telah terlaksana dengan baik.

Tersedianya data yang akurat, dapat membantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam mengetahui data-data yang sifatnya

akurat, dapat diketahui kebenarannya dan apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut, dari ketiga pedagang sayur yang mendapat bantuan kredit. Dengan adanya data yang akurat, maka dapat diketahui mengenai peningkatan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur setelah mendapat bantuan kredit. Tersedianya data yang akurat juga akan memudahkan instansi dalam memberikan bantuan kredit bagi ketiga pedagang sayur yang memanfaatkan program yang ada.

Faktor penghambat

Hambatan pelaksanaan program ini memiliki dua faktor penghambat, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal berasal dari pengetahuan dan pendidikan dari pedagang sayur sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari ketersediaan modal usaha yang ada.

Saran

Program bantuan pemberian kredit oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang perlu ditingkatkan lagi, karena program bantuan seperti inilah yang diharapkan oleh para pedagang sayur khususnya di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, karena di desa Duwet Krajan memiliki potensi yang bagus dalam bidang pertanian dan perdagangan, dan dapat menjadikan lapangan kerja baru bagi pedagang sayur lainnya yang belum memanfaatkan bantuan kredit ini. Dan umumnya bagi para pengrajin atau pelaku UKM, UMKM lainnya di Kabupaten Malang.

Daftar Pustaka

- Dharma, Agus. (2003) **Manajemen Supervisi**. Jakarta: CV Rajawali.
- Kasmir, (2002) **Manajemen Perbankan**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto. (1973) **Pengantar Ekonomi Pertanian**. Jakarta: LP 3 ES.
- Moleong. (2012) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. 1(997) **Mikroekonomi**. Alih Bahasa: Haris Munandar dkk. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, (2002) **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2010) **Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D**. Cetakan kesebelas. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul, (2001) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang : UMM Press.
- Pengertian distribusi** (2009) (Internet]. Available from: <<http://balaipustaka.wordpress.com/2009/03/15/pengertian-distribusi/>> [Accessed 12 Januari 2012].
- Sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf)
- Anne Ahira (2011) **Definisi, Kriteria dan Manfaat UMKM** [Internet]. Available from: <<http://www.anneahira.com/kriteria-dan-manfaat-umkm.htm>> [Accessed 08 September 2012].
- Pemberdayaan UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM** (2012) [Internet] Available from: <dari <http://meblogspotcom-silvana.blogspot.com/2012/06/pemberdayaan-umkm-menurut-uu-no20-tahun.html>> [Accessed 11 September 2012].
- SK Bupati Nomor 180/273/KEP/421.013/2009, tentang UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.